

# KOLONISASI BELANDA DI NEDERLANDS NIEUW GUINEA

Oleh: Dra. Rosmaida Sinaga, M. Hum

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Cendrawasih Jayapura-Papua

## **Abstrak:**

*Penerapan Politik Etis di Hindia Belanda dan krisis ekonomi dunia menyebabkan kemerosotan ekonomi para Indo-Belanda di Jawa, sehingga mendorong sebagian kaum Indo-Belanda miskin untuk mencari daerah sebagai sumber penghidupan baru ke Nederlands Nieuw Guinea (NNG). Dengan demikian sebelum kemerdekaan Indonesia, faktor ekonomi merupakan penyebab kolonisasi Indo-Belanda ke NNG. Sedangkan motivasi kolonisasi Indo-Belanda setelah kemerdekaan Indonesia adalah faktor politik yaitu kekhawatiran para Indo-Belanda tentang kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga mereka berkeinginan untuk menjadikan NNG sebagai tanah air baru bagi mereka. Namun keinginan itu tidak tercapai karena tuntutan Indonesia atas wilayah NNG semakin meningkat, sehingga para kolonis Indo-Belanda terpaksa melakukan repatriasi atau migrasi daerah itu.*

## **Pendahuluan**

Penerapan Politik Etis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 menyebabkan lahirnya kaum pribumi terpelajar. Kaum pribumi terpelajar itu yang menjadi saingan para kaum Indo-Belanda dalam memperoleh lowongan pekerjaan baik di birokrasi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta, sehingga banyak kaum Indo-Belanda yang tidak terpelajar di Jawa menjadi pengangguran. Kehidupan ekonomi para Indo-Belanda di Jawa semakin terpuruk ketika krisis ekonomi dunia terjadi. Oleh karena itu, sebagian dari mereka berusaha untuk mencari daerah sebagai sumber penghidupan baru di luar Jawa yaitu ke Nederlands Nieuw Guinea (NNG) yang berpenduduk sedikit dan wilayahnya luas. (Bruyn, 1936-1937: 49). Menurut B.J. Haga, faktor

pendorong kolonisasi Indo-Belanda ke NNG bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga keinginan untuk menjadikan NNG sebagai tanah air baru bagi Belanda dan anak-anaknya (Haga, (n.d): 50). Oleh karena itu dalam tulisan ini dikemukakan motif-motif Indo-Belanda melakukan kolonisasi di NNG sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, serta penyebab kegagalan kolonisasi Indo-Belanda di wilayah itu.

## **Pemilihan Lahan Kolonisasi**

Para kolonis pertama berangkat ke NNG dengan bantuan pemerintah pada 1929. Pemerintah daerah Nieuw Guinea menempatkan para kolonis itu di pantai selatan Teluk Geelvink. Para kolonis itu gagal meningkatkan taraf hidupnya karena ketidakmauannya untuk bekerja, kesibukannya mengajari penduduk lokal untuk bermain bola dan

olah raga lainnya, tanahnya kurang subur dan merupakan sarang malaria (Winsemius, 1936: 247).

Kegagalan para kolonis itu menyadarkan mereka untuk mengikuti saran-saran dari lembaga-lembaga kolonisasi yang dibentuk pada 1927 oleh kaum Indo-Eropa di Jawa. Lembaga itu bertujuan untuk membantu Indo-Belanda yang mengalami kesulitan hidup. Adapun lembaga-lembaga kolonisasi yang didirikan kaum Indo-Eropa tersebut adalah *Stichting Immigratie en Kolonisatie Nieuw Guinea* (SIKNG) dan *Vereeniging Kolonisatie Nieuw Guinea* (VKNG). SIKNG merupakan Lembaga Imigrasi dan Kolonisasi Nieuw Guinea yang memilih Manokwari sebagai daerah kolonisasi mereka. VKNG merupakan Lembaga Kolonisasi Nieuw Guinea yang memilih lahan kerjanya di Hollandia (sekarang Jayapura) (Bruyn, 1936-1937: 49).

Pada awalnya pemerintah kolonial kurang memperhatikan usaha kolonisasi yang disponsori oleh SIKNG dan VKNG. Kebijakan itu diubah karena krisis ekonomi dunia meningkatkan jumlah para Indo-Belanda yang menganggur di Jawa sehingga kolonisasi dianggap sebagai solusinya (Ranneft, 1936-1937: 110-1). Kebijakan pemerintah menjadikan Nieuw Guinea sebagai daerah koloni dimulai pada 1930 (Klein, 1938-1939: 365). Perhatian pemerintah ditujukan kepada kolonisasi pertanian sebagai sumber pencaharian bagi Indo-Belanda.<sup>1</sup>

Pemerintah meragukan keberhasilan para kolonis itu karena mereka berasal dari keluarga miskin yang kurang memiliki sifat-sifat

perintis. Berdasarkan teori kolonisasi bahwa suatu koloni diperkirakan berhasil apabila anggotanya menikmati kemakmuran dan kesehatan serta kemampuan kerja yang serupa atau lebih dari tempat asalnya. Para kolonis yang berangkat ke NNG itu tergolong kaum gelandangan yang gagal meningkatkan taraf hidupnya di Jawa. Keberhasilan kaum kolonis itu tergantung pada kesuburan tanah di Manokwari dan Hollandia sebagai lahan kolonisasi (Winsemius, 1936: 248-9).

### Kolonisasi Indo-Belanda di Manokwari

Manokwari terletak pada 0,5<sup>0</sup> Lintang Selatan di daerah Vogelkop (daerah Kepala Burung) di tepi Teluk Doreh. Iklim daerah Manokwari memiliki curah hujan yang tinggi dan hampir tidak mengenal musim kemarau, sehingga kurang menguntungkan bagi penghuninya untuk mengolah lahan pertanian. Kondisi inilah yang dihadapi para kolonis yang tiba di Manokwari pada Agustus 1930. Pada awalnya mereka bermukim di Manokwari, tetapi karena tanahnya tandus menyebabkan mereka menyebar ke lahan vulkanis di sepanjang pantai selatan dan barat laut Manokwari ke daerah Ambarbaken dan dataran Ransiki di Teluk Geelvink. (Winsemius, 1936: 254).

Jumlah para kolonis yang dikirim ke Manokwari dari Agustus 1930 hingga September 1934 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kaum Kolonis Yang Dikirim Ke Manokwari hingga September 1934 (Winsemius, 1936: 256)

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kerabat	Jumlah
1930	3	8	11
1931	28	60	88
1932	14	22	36
1933	75	147	222
1934	9	11	20
Jumlah	129	248	377

<sup>1</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van den Onderafdeeling Manokwari 1947-1953*, F.R.J. Eibrink Jansen, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

Pengiriman kaum kolonis terbanyak ke Manokwari terjadi pada 1933. Hal itu bertalian dengan krisis ekonomi dunia. Kekecewaan para kolonis itu atas kondisi daerah itu menyebabkan sejumlah kolonis memutuskan untuk kembali ke Jawa.

Tabel 2 Jumlah Kaum Kolonis Yang Kembali Ke Jawa dari 1930 hingga September 1934 (Winsemius, 1936:256)

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kerabat Dekat	Jumlah
1930	-	-	-
1931	1	-	1
1932	2	-	2
1933	3	3	6
1934	41	74	115
Jumlah	47	77	124

Pada 1934 para kolonis banyak yang kembali ke Jawa karena kondisi daerah itu tidak menguntungkan. Jumlah kolonis yang meninggal pada 1933 adalah 3 orang dan pada 1934 dua orang, sehingga jumlah kolonis yang masih berada di Manokwari dan sekitarnya berjumlah 248 orang. Pada 1 Januari 1935 kolonis berjumlah 250 orang. Usaha kolonisasi dilakukan para kolonis yang berjumlah 250 orang itu menjadi dasar untuk membentuk tanah air yang baru bagi kaum Indo-Belanda di NNG (Winsemius, 1936: 256).

Peningkatan jumlah para kolonis itu bukan semata-mata karena kondisi alam Manokwari yang baik, melainkan beredarnya berita-berita yang optimis tentang wilayah NNG dan kemerosotan kemakmuran kaum Indo-Belanda di Jawa. Peningkatan jumlah kaum kolonis itu tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan pemukimannya, sehingga banyak para kolonis yang bermukim di pesanggarahan milik SIKING tanpa bekerja. Kehidupan para kolonis itu sangat memprihatinkan, namun berita yang dikirim SIKING ke Jawa berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam surat-surat harian organisasi SIKING yang dikirim ke Jawa dituliskan bahwa banyak babi yang berkeliaran untuk ditembak, banyak makanan yang tumbuh sendiri dan wilayah NNG merupakan tanah yang dijanjikan. Direksi SIKING merahasiakan bencana yang dialami para kolonis itu dan mengaburkan berita-berita wabah malaria dengan menyatakan bahwa semangat para kolonis tetap baik meskipun ada dari antara mereka yang menderita sakit malaria. Pemberitaan itu mengakibatkan kaum kolonis baru tetap tertarik untuk datang ke Manokwari (Winsemius, 1936: 258-9).

Pemukiman para kolonis Indo-Eropa di lingkungan Manokwari dapat ditemukan di Manokwari, Fanindi, Pasir Putih, Pami, Warbambu, Manggoapi, Wosi, Sowi, Rendani, Andai dan Maruni (Winsemius, 1936: 260). Pemukiman kaum kolonis di luar lingkungan Manokwari terdapat di lembah Kebar (Winsemius, 1936: 298). Manokwari menjadi pusat kolonisasi Indo-Belanda, tetapi ibukota Manokwari tidak dimasukkan sebagai lahan kolonisasi, melainkan sebagai tempat persinggahan untuk memantau daerah di sekitarnya yang cocok untuk lahan pertanian (Winsemius, 1936: 261-2). SIKING berkeinginan untuk menjadikan Manokwari sebagai pusat ekonomi dan tanah air baru bagi para pensiunan kaum Indo-Belanda yang berasal dari Jawa. Para pensiunan itu menjadi konsumen produk pertanian para kolonis itu (Winsemius, 1936: 262).

Para kolonis yang tinggal di Manokwari dan Fanindi dapat dibedakan atas kelompok pensiunan beserta anak-anaknya dan kaum kolonis miskin yang mencari pekerjaan. Para pencari kerja itu hidup tanpa melakukan apapun dan mengembara

dari satu pemukiman ke pemukiman lainnya. Sepak bola dan berburu merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi para pencari kerja itu. Beberapa orang dari pencari kerja itu tidak berminat untuk bekerja di bidang pertanian. Kondisi itu disebabkan latar belakang kehidupan para kolonis itu yang biasa tinggal di kota-kota yang ada di Jawa. Keinginan para kolonis bermukim di ibukota berkaitan dengan keinginannya untuk menikmati barang-barang mewah. Hal ini dapat diketahui dari daftar permohonan kebutuhan yang diminta dalam surat-surat para kolonis itu, di antaranya telepon, bioskop, sarana pengangkutan seperti kereta kuda, dokar, mobil, taksi, bis, keretaapi, trem, dan gerobak listrik. Pemerintah memahami keinginan para kolonis itu, namun barang-barang itu tidak dapat dimasukkan dalam bantuan ekonomi (Winsemius, 1936: 263-4).

Para kolonis itu tidak memiliki pengetahuan tentang pertanian dan peternakan, sehingga usahanya tidak menghasilkan apapun. Mereka tidak mempunyai sarana pengangkutan untuk mengangkut hasil panennya, sehingga mereka memerlukan tangan kedua untuk menjual hasil pertanian/peternakannya. Akibatnya mereka tidak mendapat keuntungan dari usahanya melainkan para makelar Cina yang memperoleh keuntungan (Vrijburg, 1937-1938: 84-7).

Sejak 1934 pemerintah menempatkan seorang konsultan pertanian dari Dinas Penerangan Pertanian di Manokwari untuk memberikan berbagai informasi pertanian kepada para petani penduduk lokal dan para kolonis Indo-Belanda. Kurangnya minat penduduk lokal mengelola lahan pertaniannya menjadi

penyebab perhatian konsultan pertanian itu lebih difokuskan kepada petani Indo-Belanda.<sup>2</sup>

Pada 1934 pemerintah memberikan bantuan yang diperoleh dari saham keuntungan lotere tahunan sebesar f 14.000 kepada SIKNG untuk membiayai kebutuhan para kolonis di Manokwari. Pemerintah mengawasi penyaluran bantuan itu (Winsemius, 1936: 285). Pemberian bantuan itu sejalan dengan meningkatnya propaganda emigrasi orang Belanda ke Nieuw Guinea oleh pemerintah kolonial (Klein, 1938-1939: 362).

Pada awal kolonisasi di Manokwari kondisi keuangan para kolonis sangat beragam. Untuk mengetahui sumber keuangan para kolonis pada September 1934 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Sumber Keuangan Para Kolonis di Manokwari Pada September 1934 (Winsemius, 1936: 284)

No.	Sumber Keuangan	Jlh. Kepala Keluarga	Isteri	Jlh. Anggota	Jumlah
1	Dana Pensiunan	20	14	46	80
2	Bantuan Komisi Krisis	14	7	26	47
3	Bantuan Kapitalis Kecil	6	4	22	32
4	Bantuan Kerabat	9	1	9	19
5	Bantuan SIKING	23	7	18	48
6	Biaya Sendiri	9	5	8	22
	Jumlah	81	38	129	248

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hanya 22 orang yang tidak menerima bantuan. Para pensiunan dikategorikan sebagai kaum kolonis yang paling kuat secara keuangan karena gajinya mampu menjamin kebutuhan hidupnya. Para kolonis yang pensiunan itu sudah berusia lanjut, sehingga mereka menggaji tenaga kerja penduduk lokal dari gaji pensiunannya (Winsemius, 1936: 284).

<sup>2</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van den Controleur B.B. van Manokwari W. Kuipers, Bestuur Periode 30 Maret 1936-7 Desember 1937*, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

Kehidupan kaum kolonis semakin membaik seiring dengan pemberian bantuan langsung oleh pemerintah kepada kaum kolonis sejak 1 Juli 1935. Berdasarkan peraturan itu setiap keluarga kaum kolonis menerima f 7.50 perbulan ditambah satu kati beras (625 gram) per orang per hari. Setelah Residen Haga dan SIKING berunding, jumlah bantuan dinaikkan dan dibedakan menjadi bantuan kelompok A dan B. Bantuan kelompok A diberikan kepada kaum kolonis yang rajin dan bantuan kelompok B diberikan kepada kaum kolonis yang kurang rajin. Besarnya bantuan untuk kelompok A adalah: (1) untuk satu keluarga tanpa anak f 35 perbulan; (2) untuk setiap anak di atas 12 tahun f 4 per bulan; (3) untuk setiap anak di bawah 12 tahun f 2,50 per bulan; (4) untuk setiap bujangan f 17,50 per bulan. Sedangkan besarnya bantuan untuk kelompok B adalah: (1) untuk satu keluarga tanpa anak f 17,50 per bulan; (2) untuk setiap anak di atas 12 tahun f 4 per bulan; (3) untuk setiap anak di bawah umur 12 tahun f 2,50 perbulan; (4) untuk setiap bujangan f 12,50 per bulan. Pemerintah membentuk suatu komisi yang terdiri atas pejabat pertanian, seorang anggota kolonis dan aspiran kontrolir untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan kelompok A atau B. Pengelompokan itu dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Bantuan diberikan selama tiga tahun. Setiap setengah tahun bantuan dikurangi 20 %, sehingga pada 1 Januari 1939 kaum kolonis harus bekerja tanpa menerima bantuan dari pemerintah (*Kolonisatie*, 1937: 339-340).

Peraturan bantuan 1 Juli 1935 didasarkan pada pemikiran bahwa usaha para kolonis itu diperkirakan berhasil dalam tempo tiga tahun

sehingga mampu memenuhi bantuan yang dikurangi. Namun kenyataannya jangka waktu pemberian bantuan itu dianggap terlalu pendek dan tidak memadai untuk membeli alat pertanian yang dibutuhkan para kolonis itu. Oleh karena itu, pada awal 1937 pemerintah memberikan pinjaman kepada para kolonis sebesar antara f 60 sampai f 1000 untuk mengembangkan usahanya. Namun usaha para kolonis itu kurang menguntungkan, sehingga sulit untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan (*Kolonisatie*, 1937: 340).

Van Driest yang selama satu setengah tahun tinggal di Nieuw Guinea memberikan penilaian bahwa kondisi di sekitar Manokwari dianggap lebih baik daripada di Hollandia. Van Driest berpendapat bahwa kolonisasi dapat dilakukan dari sudut pandang ekonomi pertanian, karena kondisi tanah Manokwari memadai untuk dijadikan lahan pertanian. Van Driest mengusulkan agar para kolonis itu diberi bantuan berupa ternak, peralatan pertanian, material untuk membangun rumah, gudang, pagar lahan dan persediaan air. Jangka waktu pembayaran pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha para kolonis (*Kolonisatie*, 1937: 341-2).

Pengembangan usaha pertanian padi dalam skala besar terbentur pada masalah kurangnya tenaga kerja di sekitar Manokwari. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penggunaan tenaga mekanis. Para kolonis mengharapkan pengadaan peralatan pertanian ini dari bantuan pemerintah. Faktor penunjang lainnya keberhasilan usaha kaum kolonis ini adalah tersedianya daerah pemasaran hasil pertaniannya. Van Driest mengusulkan daerah pemasarannya harus dicari di



Cina, Jepang, Amerika dan Australia. Selain itu, van Driest mengusulkan agar pemerintah mengadakan eksplorasi atas semua wilayah Nieuw Guinea untuk kepentingan kolonisasi dan pengembangan usaha pertanian. Usul ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat itu pemerintah hanya mengetahui kondisi tanah di daerah pantai Nieuw Guinea sementara daerah pedalaman sebagian besar belum terbuka (*Kolonisatie*, 1937: 340-3).

### Kolonisasi Indo-Belanda di Hollandia

Hollandia terletak di pantai utara Nieuw Guinea pada 2° 33' Lintang Selatan dan 142° 44' Bujur Timur. Lahan kolonisasi VKNG terletak di sekitar Danau Sentani di dataran alluvial yang penuh dengan batuan, sehingga tanah di lahan kolonisasi itu kurang subur (Winsemius, 1936: 303-4).

VKNG menetapkan lahan untuk para kolonis di daerah Maribu, daerah di sekitar Teluk Humboldt dan Doyo (Winsemius, 1936: 305). VKNG bertolak dari pandangan bahwa kolonisasi petani Indo-Belanda dapat bertahan dalam kondisi yang tidak terdapat saingan dari petani penduduk lokal. Oleh sebab itu, VKNG mencari daerah di mana Indo-Belanda dapat membangun sebuah tanah air baru di daerah NNG yang luas dan penduduknya langka (*Indisch Verslag*, 1933: 377).

Pada Oktober 1930 rombongan pertama para kolonis yang dikelola VKNG berangkat ke Hollandia (*Indisch Verslag*, 1933: 377). Untuk mengetahui jumlah para kolonis yang dikirim ke Hollandia dari Oktober 1930 hingga September 1934 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Kaum Kolonis Yang Dikirim Ke Hollandia hingga September 1934 (Winsemius, 1936: 306)

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kerabat	Jumlah
1930	39	6	45
1931	31	48	79
1932	8	22	30
1933	20	12	32
1934	5	12	17
Jumlah	103	100	203

Pengiriman kaum kolonis terbanyak ke Hollandia terjadi pada 1931. Kekurangsuburan tanah yang menjadi lahan kolonisasi di Hollandia menyebabkan dari antara para kolonis itu ada yang kecewa dan kembali ke Jawa. Jumlah kolonis yang kembali ke Jawa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Kaum Kolonis Yang Kembali Ke Jawa dari 1930 hingga September 1934 (Winsemius, 1936: 306)

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kerabat Dekat	Jumlah
1930	2	-	2
1931	26	27	53
1932	14	6	20
1933	3	-	3
1934	24	4	28
Jumlah	69	37	106

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih setengah jumlah kolonis yang diberangkatkan ke Hollandia kembali ke Jawa karena tanah lahan pertaniannya yang kurang subur. (Winsemius, 1936: 305-6). Berkurangnya jumlah kolonis di Hollandia juga karena meninggal dunia sebanyak empat orang yaitu seorang ibu pada 1930 dan seorang lagi pada 1931, Seorang bapak pada 1933 dan seorang anak pada 1934, sehingga jumlah kolonis yang bermukim di Hollandia pada September 1934 adalah 93 orang (Winsemius, 1936: 306).

Lahan utama para kolonis yang dikelola VKNG itu terdapat di sekitar Danau Sentani (Onderafdeeling Hollandia), dataran Doyo dekat pemukiman orang Papua di antara

kampung Doyo dan kampung Sabron. Lahan lainnya terdapat di sebelah timur Teluk Humboldt di Hol Te Kang. Para kolonis itu bermukim 60 orang di desa Bijlslag, 21 orang di Julianadorp (desa Juliana) dan 12 orang di Abelsdorp (Maribu) (Winsemius, 1936: 309).

Pada awalnya para kolonis bermukim di sepanjang jalan Depapre-Ifar. VKNG memperoleh lahan seluas 5000 hektar di sebelah utara jalan Depapre-Ifar dari pemerintah. VKNG berharap dengan menguasai wilayah seluas itu, Negara Indo-Belanda di NNG dapat diwujudkan. Namun lahannya kurang subur, sehingga kaum kolonis itu dipindahkan ke Sabron, yang disebut Bijlslag. Pemukiman kolonis lainnya terletak di sebelah timur Bijlslag yaitu Julianadorp dan pemukiman di sebelah baratnya disebut Abelsdorp (Winsemius, 310-1).

Pada awalnya para kolonis itu bersemangat melaksanakan pembabatan lahan untuk meletakkan dasar pembentukan tanah air baru bagi Indo-Belanda. Akan tetapi semangat mereka untuk mendirikan tanah air baru segera lenyap karena serangan demam malaria. Keadaan itu semakin parah karena minimnya makanan yang dibawa kapal yang singgah di Hollandia pada Desember 1930. Pada Maret dan April 1931 para kolonis itu kehabisan uang. Akibatnya beberapa orang dari antara para kolonis itu menderita stress. Kesusahan para kolonis itu semakin berat karena banjir melanda koloni Bijlslag (Winsemius, 1936: 311).

Pemilikan lahan yang tidak tercatat atasnama para kolonis merugikan saat kaum kolonis diberi sebuah petak lainnya yang bukan petak tanah yang sudah digarapnya. Oleh karena itu, kaum kolonis menuntut perubahan atas aturan itu (*Kolonisatie*,

1937: 334-5). Menurut B.J. Haga para kolonis VKNG di Hollandia menghadapi berbagai masalah, di antaranya pengaturan petak tanah, tanah yang kurang subur, pengangkutan sangat sulit dan tidak adanya pemasaran produk pertanian. Oleh karena itu, B.J. Haga mengusulkan untuk memindahkan kaum kolonis dari Hollandia ke Manokwari melalui kesepakatan antara VKNG dan SIKING. Menurut B.J. Haga Manokwari merupakan tempat pemasaran terbaik untuk hasil produk pertanian para kolonis dan lahan kolonisasi yang menguntungkan karena adanya campur tangan pemerintah, tersedianya penerangan pertanian dan bantuan medis serta sekolah Eropa (Haga, (n.d.): 54).

B.J. Haga berharap agar pemerintah dan VKNG bersedia menggunakan pengaruhnya untuk memindahkan kaum kolonis itu ke Manokwari (Haga, (n.d.): 54). VKNG membuka lahannya di Oransbari (60 km di selatan Manokwari). Para kolonis yang ditempatkan di Oransbari baik yang berasal dari Jawa atau dari Hollandia menerima bantuan dari pemerintah sebagai berikut: biaya perlengkapan sebesar f 100, biaya pembangunan rumah sementara sebesar f 100, biaya untuk pengolahan lahan dan penanaman tanaman seluas 2 hektar sebesar f 100. Bantuan itu diberikan selama 3 tahun (Haga, (n.d.): 55). Para kolonis menerima bantuan berupa makanan gratis sebesar f 7.50 sebulan untuk setiap keluarga (*Kolonisatie*, 1937: 335).

Sejarah Nieuw Guinea mencatat rangkaian kegagalan dari usaha kolonisasi sebagai akibat dari iklim yang sangat tidak sehat. Setiap usaha kolonisasi yang dilakukan tanpa pemantauan yang memenuhi standar

diidentikkan dengan mempermainkan nyawa manusia. Suatu kondisi yang sangat menguntungkan bagi usaha kolonisasi di Nieuw Guinea karena orang Papua memiliki ketrampilan dalam membabat hutan liar. Namun orang Papua tidak bisa diharapkan untuk menggarap tanah secara intensif. Oleh karena itu, kegiatan membajak dan mencangkul harus dilakukan sendiri oleh kaum kolonis (Bruyn, 1936-1937: 49-50). Sebelum berangkat ke Nieuw Guinea kaum Indo-Belanda sudah terbiasa hidup serba dilayani, tetapi ketika mereka tiba di Nieuw Guinea tidak ada tenaga kerja yang bisa melayaninya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor kegagalan usaha kolonisasi pertama di Nieuw Guinea.

Faktor lainnya yang menyebabkan kegagalan kolonisasi di Hollandia adalah tidak dilakukannya seleksi terhadap para kolonis yang diberangkatkan ke daerah itu. Hal ini dapat diketahui dari berita yang tertulis dalam *Soerabaiasch Handelsblad* 26 Agustus 1931 bahwa “ada seorang badut dari sebuah circus turut serta diberangkatkan ke Hollandia sebagai kolonis”. Dalam *Java Bode* 3 Agustus 1931 ditemukan sebuah artikel yang berjudul “Sekelompok orang yang malas bekerja dikirim ke Hollandia”. Rendahnya semangat kerja para kolonis itu dapat diketahui dari pendeskripsian berikut ini: “di beranda rumah ditemukan sebuah kursi rotan, tempat para kolonis duduk-duduk tanpa melakukan apapun, para kolonis itu hanya mengamati hewan-hewan yang berkeliaran. Di sebuah bale-bale kaum kolonis berjemur sepanjang hari sambil mengawasi beberapa orang Papua yang dipekerjakannya di lahan pertaniannya (Winsemius, 1936: 311-2).

Pada November 1931 para kolonis membuka lahan seluas 11 hektar, tetapi yang ditanami hanya seluas tiga seperempat hektar. Rendahnya hasil usaha para kolonis itu mendorong pemerintah pusat di Jawa untuk memutuskan bahwa kaum kolonis tidak lagi diberikan makanan dan bantuan secara gratis. Pemerintah menyatakan bahwa “siapa yang tidak mau bekerja, tidak perlu makan”. Oleh karena itu, kaum kolonis tidak lagi menerima makanan dan bantuan tanpa bekerja. Kaum kolonis dilarang menggunakan tenaga kerja orang Papua, kecuali untuk pembukaan hutan. Larangan itu merugikan kaum kolonis yang rajin. Larangan itu ditujukan untuk mencegah kemalasan kaum kolonis. Untuk menghindari larangan itu ada beberapa kaum kolonis yang pindah dari lahan kolonisasi yang dikelola VKNG ke lokasi lainnya dengan menyewa tanah dari pemerintah sehingga mereka secara diam-diam mempekerjakan tenaga kerja Papua. Sementara kaum kolonis yang tetap bertahan di lahan yang dikelola VKNG tetap menerima bantuan dari VKNG. VKNG bertindak terlalu lunak dan membantu semua kaum kolonis. Kebijakan VKNG itu dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan para kolonis itu tidak terdorong untuk bekerja (Winsemius, 1936: 312-4).

Kebijakan VKNG tentang larangan penggunaan tenaga kerja Papua dianggap sebagai usaha untuk membuka sebuah pemukiman penduduk Indo-Eropa yang homogen. Dalam suatu masyarakat di mana dua ras yang berbeda hidup bersama, orang-orang Eropa menganggap kerja kasar sebagai pekerjaan yang merendahkan martabatnya. VKNG tidak menyadari larangan itu mengakibatkan lamanya



waktu untuk membuka lahan, sehingga lahan yang dibuka itu kembali ditumbuhi semak belukar (Winsemius, 1936: 315-6).

Daerah Hollandia dianggap sebagai daerah malaria dan lahan kolonisasi yang salah pilih. Untuk mengatasi penyakit malaria, pemerintah membagikan klambu dan pil kina secara rutin kepada para kolonis. Makanan sangat dibutuhkan untuk pemulihan kesehatan penderita malaria. Oleh karena itu para kolonis itu juga diberikan beras dan daging kaleng impor dari Jawa atas bantuan pemerintah. Para kolonis di Hollandia hampir tidak mengkonsumsi makanan tambahan. Kurangnya asupan gizi dikalangan kolonis menyebabkan salah satu kolonis penderita beri-beri dikirim ke Jawa pada 1934 (Winsemius, 1936: 320).

Meskipun kondisi kehidupan para kolonis sangat memprihatinkan, acapkali mereka memesan barang-barang yang tidak diperlukan ke toko Cina dengan berhutang. Sikap ceroboh serupa terbukti dari permohonan seorang wanita kolonis yang mengirimkan sejumlah anggrek untuk dijual di Jawa yang hasil penjualannya dibelikan piano, bukannya meminta skop atau alat pertanian lainnya. Mereka gemar bermain musik dan mampu menghabiskan waktunya sepanjang hari dengan bermain gitar (Winsemius, 1936: 321-2).

Kegagalan para kolonis meningkatkan kehidupan ekonominya mendorong pemerintah untuk membentuk dewan kolonisasi pada 3 Maret 1937. Selama 1937 dewan kolonisasi itu ditugaskan untuk meninjau lahan kolonisasi di Manokwari dan Hollandia. Para anggota dewan itu meneliti sejumlah masalah yang berkaitan dengan kolonisasi yakni

pemberian subsidi dari yayasan kolonisasi, pendidikan dan seleksi kaum kolonis, pemberian bimbingan di daerah kolonisasi, masalah hak atas tanah, persoalan wanita dalam kolonisasi dan pemberantasan penyakit tanaman dan ternak. Berdasarkan hasil penelitian itu diketahui bahwa kegagalan para kolonis di NNG disebabkan berbagai masalah yaitu ketidakcocokan lahan kolonisasi untuk pertanian, kurangnya pengetahuan para kolonis di bidang pertanian/peternakan, kurangnya persiapan dan pengelolaan kolonisasi, minimnya biaya yayasan kolonisasi untuk membiayai rencananya dan kondisi lahan yang tidak sehat dan cuaca yang kurang mendukung (*Indisch Verslag*, 1938: 399-340).

### **Kolonisasi Indo-Belanda di NNG Setelah Kemerdekaan RI**

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya para Indo-Belanda dan para pengusaha Belanda dari Jawa berkeinginan untuk meninggalkan Indonesia dan melakukan kolonisasi ke Nederlands Nieuw Guinea. Ketika Konferensi Pangkalpinang berlangsung, peserta konferensi dari golongan Indo-Belanda menyampaikan kekhawatirannya tentang kedudukan mereka dalam susunan ketatanegaraan Indonesia dan mengusulkan untuk menjadikan NNG sebagai tanah air baru untuk penduduk yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Keinginan para Indo-Belanda itu mendapat perhatian dari berbagai golongan di negeri Belanda yang ingin mempertahankan NNG sebagai daerah jajahan Belanda. Kedudukan Indo-Belanda di Indonesia dijadikan alasan yang sesuai dengan perikemanusiaan dan ajaran agama untuk menghindari NNG jatuh ke tangan Indonesia yang

dianggap merugikan kedudukan Indo-Belanda (Koentjaraningrat & Harsja W. Bachtiar, 1963: 81). Dengan demikian Belanda dapat mempertahankan kepentingannya atas wilayah NNG yaitu menjadikan daerah itu sebagai tempat penampungan keturunan Indo-Belanda yang tidak dapat kembali ke Holland dan tempat penampungan para pengusaha Belanda yang meninggalkan Indonesia (Bone, 1958: 22).

Untuk meningkatkan kehidupan para kolonis dan menangani keluhan para kolonis, sebuah Dewan Kolonisasi dibentuk di Nieuw Guinea pada September 1947 yang berfungsi sebagai badan penasehat.<sup>3</sup> Atas permohonan dewan ini suatu penelitian ilmiah diadakan untuk membentuk usaha percobaan di bidang pertanian yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman baru dan menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pendidikan bagi kaum kolonis di Nieuw Guinea. Adapun jenis tanaman baru yang dikembangkan adalah jenis tanaman tahunan seperti coklat, lada, cengkeh, pala, kopi dan jeruk.<sup>4</sup> Melalui pengenalan tanaman baru itu diharapkan pendapatan para kolonis meningkat.

Dalam rangka pengembangan usaha pertanian para kolonis, pemerintah memberlakukan peraturan tentang hak sewa tanah dari penduduk pribumi dan harga sewanya untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun. Pemerintah menetapkan harga sewa tanah di Nieuw Guinea sekitar 20 sen

per hektar per tahun. Menurut Residen Maluku Dr. Haga bahwa dalam peraturan sewa tanah yang berlaku bagi daerah luar Jawa ditetapkan jumlah sewa tahunan maksimal f 1 per hektar. Harga sewa lebih rendah dimungkinkan untuk daerah tertentu seperti Nieuw Guinea karena berkaitan dengan jarak dan sarana komunikasi yang belum baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya (Nieuw Guinea Comite, 1936: 195). Penetapan harga sewa tanah yang lebih murah itu dimaksudkan pemerintah untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya di Nieuw Guinea.

Pada Desember 1949 kaum kolonis di Manokwari bertambah dengan kedatangan 1400 orang Indo-Belanda dari Jawa. Dalam bulan-bulan berikutnya masih datang beberapa ratus orang Indo-Belanda dari wilayah Indonesia lainnya ke Manokwari. Para kolonis itu pada umumnya tidak mempunyai pengalaman di bidang pertanian. Pemerintah memberikan perhatian terhadap pertanian melalui Jawatan Penyuluhan Pertanian kepada kelompok petani Indo-Belanda (Schoorl, 2001: 152).

Pada 1952 pemerintah mendirikan "Pusat Pengembangan" di Manokwari, untuk membantu para kolonis membuka hutan untuk lahan pertanian dengan memberikan fasilitas penyewaan bulldoser beserta supirnya, dengan harga yang ditetapkan per jam (Maurenbrecher, 1953: 213-4). Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan para kolonis dan mendukung ekspor produk pertanian yang dicanangkan pemerintah kolonial pada waktu itu.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van Controleur Manokwari van de F.R.J. Jansen*, Manokwari 1947-1952, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

<sup>4</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink*, 1953-1956, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

<sup>5</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink*, 1953-1956, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

Sementara itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan bidang peternakan di Manokwari. Untuk maksud tersebut, sejak 1952 pemerintah menempatkan seorang ahli peternakan di Manokwari yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur pembiakan ternak, terutama sapi dan babi. Untuk keperluan pembiakan tersebut, mendatangkan 6 ekor sapi perah, 2 ekor sapi jantan dan 7 ekor babi dari Belanda.<sup>6</sup>

Dinas Pertanian turut berpartisipasi untuk membantu pengembangan bidang peternakan melalui penyediaan pakan ternak. Penyediaan pakan ternak dilakukan dengan usaha pembibitan jenis rumput unggul dan penanaman rumput tersebut. Pemerintah berharap para peternak dapat membudidayakan tanaman rumput itu.<sup>7</sup>

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas ternak yang dihasilkan para peternak di Manokwari. Untuk mencapai maksud tersebut dilakukan perkawinan silang antara ternak impor dengan ternak lokal. Pemerintah juga mendirikan karantina hewan di Wosi untuk memeriksa dan memastikan ternak impor bebas dari segala penyakit.<sup>8</sup>

Pada 1953 pemerintah membuka sebuah kebun percobaan di Wosi sebagai pusat pengembangan jenis

tanaman ekspor dan pusat pendidikan untuk para petani muda dari kaum kolonis Indo-Belanda. Kebun percobaan itu menjadi tempat untuk melakukan percobaan menanam tanaman tahunan seperti coklat, lada, cengkeh, pala, kopi dan karet. Pemerintah mengangkat seorang konsultan pertanian untuk memimpin kebun percobaan itu.<sup>9</sup> Selain sebagai pusat pengembangan tanaman tahunan, kebun percobaan itu juga menjadi pusat pengembangan tanaman pangan seperti ubi dan kedelai. Pengembangan tanaman pangan itu dimaksudkan untuk memberikan benih unggul ubi dan kedelai kepada penduduk lokal. Pemberian benih unggul itu bertujuan untuk memberikan jenis-jenis tanaman pangan yang terbaik kepada penduduk lokal di Manokwari.<sup>10</sup>

Sejak 1957 pemerintah mengucurkan kredit kepada para petani kecil yang melakukan budidaya tanaman ekspor dan memiliki biaya untuk membuka lahan dan merawat tanaman sebesar 25 % dari biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan itu. Pemberian kredit itu bertujuan untuk memotivasi para petani baik kaum kolonis Indo-Belanda maupun penduduk lokal melakukan budidaya tanaman ekspor, khususnya coklat.<sup>11</sup> Dengan adanya syarat demikian, kecil kemungkinan petani penduduk lokal dapat memperoleh kredit tersebut.

---

<sup>6</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van den Onderafdeeling Manokwari*, F.R.J. Eibrink Jansen, 1947-1953, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

<sup>7</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur van Manokwari*, W.G.F. Winia, Manokwari, 31 Agustus 1958, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

<sup>8</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink*, 1953-1956, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

---

<sup>9</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink*, 1953-1956, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

<sup>10</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink*, 1953-1956, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

<sup>11</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur van Manokwari*, W.G.F. Winia, Manokwari, 31 Agustus 1958, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

Dengan demikian mayoritas penerima kredit itu adalah petani Indo-Belanda.

Pada akhir 1959 usaha pertanian para kolonis semakin berkurang disebabkan perhatian pemerintah dialihkan dari petani Indo-Belanda ke produksi pertanian dan pangan penduduk Papua. Perubahan kebijakan tersebut bertalian dengan perkembangan politik dan kenegaraan antara Indonesia dan Belanda yang menuntut percepatan pengembangan ekonomi penduduk Papua. Tuntutan percepatan pengembangan ekonomi penduduk NNG seiring dengan adanya keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan otonomi mutlak bagi NNG. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi penduduk lokal NNG, pemerintah kolonial menugaskan Dinas Pertanian untuk memperbaiki kondisi pangan penduduk lokal melalui sosialisai metode kerja dan penanaman tanaman pangan yang lebih baik, menaikkan penghasilan penduduk lokal melalui penerapan tanaman ekspor dan pencarian pasar hasil pertanian.<sup>12</sup>

Meskipun perhatian pemerintah berkurang terhadap para kolonis, pendirian perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga baru di Manokwari serta perluasan tenaga militer pada 1959-1960 menyebabkan posisi petani kecil dan golongan menengah Indo-Belanda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun pada saat yang bersamaan kondisi politik kurang menguntungkan bagi para kolonis. Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di NNG, para kolonis Indo-Belanda di Manokwari melakukan repatriasi atau migrasi dari NNG

(Schoorl, 2001: 152-3). Dengan demikian kondisi politik di NNG yang kurang menguntungkan menjadi faktor kegagalan Belanda dalam mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan tanah air baru bagi Indo-Belanda di NNG atau "Holland di daerah tropis".

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda dan krisis ekonomi dunia menyebabkan kemerosotan ekonomi kaum Indo-Belanda di Jawa. Tekanan ekonomi itu menyebabkan mereka berusaha untuk mencari daerah sebagai sumber penghidupannya yang baru ke NNG. Mereka memilih Nieuw Guinea karena wilayah itu luas dan penduduknya sedikit.

Namun usaha kolonisasi itu mengalami kegagalan untuk meningkatkan taraf hidup para Indo-Belanda. Hal itu disebabkan kurangnya pengetahuan para kolonis itu di bidang pertanian/peternakan, tidak adanya seleksi atas para kolonis yang diberangkatkan ke NNG, tidak tersedianya tenaga kerja di NNG, wabah malaria, kurangnya pasar atas hasil pertanian, pengangkutan kurang memadai dan sikap VKNG yang lunak dalam hal pemberian bantuan kepada kaum kolonis.

Sementara setelah kemerdekaan Indonesia faktor pendorong kolonisasi Indo-Belanda ke NNG adalah kekwatiran mereka atas posisi mereka di Negara Indonesia yang baru merdeka itu, sehingga mereka menginginkan menjadikan NNG sebagai tanah air baru bagi mereka. Namun upaya mereka menjadikan NNG sebagai tanah air barunya mengalami kegagalan. Adapun faktor kegagalan kolonisasi disebabkan keadaan politik yang berkembang di NNG. Tingginya

<sup>12</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur Manokwari* F.H. Peters, 1961, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

tuntutan Indonesia atas wilayah NNG memaksa Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan penduduk lokal NNG. Akibatnya usaha petani kaum kolonis semakin merosot. Meskipun usaha pertanian para kolonis semakin merosot, para kolonis masih berkesempatan untuk memperoleh lahan pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta dan diperluasnya aparat kepolisian dan militer menyebabkan kehidupan ekonomi para kolonis semakin membaik. Walaupun kesejahteraan para kolonis semakin meningkat, mereka terpaksa melakukan repatriasi atau migrasi dari NNG karena meningkatnya tuntutan Indonesia atas wilayah NNG. Dengan demikian faktor kegagalan Belanda mewujudkan “Holland di daerah tropis” adalah meningkatnya tuntutan Indonesia atas wilayah NNG.

## Daftar Pustaka

### Arsip

ANRI, *Memorie van Overgave van den Controleur B.B. van Manokwari W. Kuiper, Bestuur Periode 30 Maret 1936 – 7 Desember 1937*. Reel No. 40, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van den Onderafdeeling Manokwari, F.R.J. Eibrink Jansen, 1947-1953*, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling Manokwari van H.W. Assink, 1953-1956*, Reel No. 39, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van de Controleur Manokwari van der F.R.J. Jansen, Manokwari 1947-1952*, Reel No. 40, MvO Serie 1e.

### Sumber Resmi Tercetak

Haga, B.J., *Memorie van Overgave van Bestuur van den Aftredenden Resident der Molukken*, tanpa tahun terbit.

*Indisch Verslag*, 1933

*Indisch Verslag*, 1938

Maurenbrecher, L.L.A., “Memorie van Overgave over de Afdeeling West Nieuw Guinea, 1953”, dalam J. Miedema dan W.A.L. Stokhof (eds.), *Irian Jaya Source Materials No. 6 Series A – No. 3*: Leiden: DSALCUL/IRIS, 1993.

### Artikel

Anonim, “Kolonisatie in Nieuw Guinea”, *Tijdschrift Nieuw-Guinea*, Aflevering 4, 15 April 1937, hlm. 332-344.

Bruyn, W.K.H. Feuilleetau De, “Kolonisatie van Europeanen en Indo-Europeanen op Nederlandsch Nieuw Guinea”, *Tijdschrift Nieuw Guinea 1936-1937*, hal. 48-51.

Klein, W.C., “Wat door Nederland in de Laatste 4 Jaren op Nieuw Guinea Gedaan is”, *Tijdschrift Nieuw Guinea 1938-1939*, hal. 361-413.

Nieuw Guinea Comite, “Erfpachscanon in Nederlandsch Nieuw Guinea”, *Tijdschrift Nieuw-Guinea*, Aflevering 4, 15 Desember 1936, hal. 195-196.

Ranneft, J.W. Meyer, “Nieuw Guinea: Een Kolonisatie van Indie”, *Tijdschrift Nieuw Guinea 1936-1937*, hal. 110-111.

Vrijburg, B., “Kolonisatie naar Indie”, *Tijdschrift Nieuw Guinea 1937-1938*, hlm. 84-87.



## **Buku**

Bone, Robert C., 1958, *The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, Ithaca: Cornell Universty.

Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, 1963. *Penduduk Irian Barat*, Jakarta: Penerbitan Universitas.

Schoorl, PIM, 2001. *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*. Jakarta: Garba Budaya.

Winsensius, J., 1936, *Nieuw-Guinea Als Kolonisatie-Gebied voor Europeanen en Indo-Europeanen*, Purmered: J. Muusses.